



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH

Yacoeb Triandy Hudoyo ✉ Amir Mahmud

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2014
Disetujui Oktober 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:
Financial Disclosure;
Internet; Regional Wealth;
Per Capita Income ; and
Leverage

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan per Kapita, dan Leverage terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mendapat predikat WTP dan WTP-DPP pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK, Pendapatan per Kapita yang didapat dari BPS pada tahun 2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah, leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan pengungkapan laporan keuangan di internet.

Abstract

The purpose of this study was to examine the influence of regional wealth, per capita income, and the Leverage of financial disclosure statements on the internet by local governments. The population in this study was 50 County Government and city got the predicate WTP and WTP-DPP in 2011. This study uses secondary data in the form of local government financial reports of BPK, per capita income gained from BPS in 2011. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with a coefficient of determination, and t. test results showed that per capita income effect on financial disclosure statements on the internet by local governments. The wealth of the region, leverage does not affect the financial disclosure statements on the internet by local government in Indonesia. For local government is expected to pay more attention to financial disclosure statements on the internet.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: mr_qub@live.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan sektor publik di Indonesia menuntut transparansi yang semakin meningkat. Salah satu peraturan yang mendasari yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Menurut Mulyana dalam Sinaga (2010) faktor yang menyebabkan isu transparansi keuangan daerah semakin meningkat ialah krisis ekonomi yang telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Ditambah dengan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional menurut Bonson dan Escobar dalam Puspita dan Martani (2007). Selain biaya yang relatif murah, digitalisasi juga memudahkan dalam penyebarluasan informasi, karena sifatnya langsung menyeluruh ke seluruh aspek elemen tanpa pandang bulu, sehingga semua dapat langsung mengaksesnya kapan pun dan darimana pun tempatnya.

Perkembangan di bidang teknologi saat ini begitu pesat, terutama di bidang informasi khususnya internet. Semakin banyaknya pengguna internet di tengah masyarakat menjadi cerminan bahwa internet telah menjadi kebutuhan penting. Dari data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan

pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Fenomena ini dimanfaatkan oleh sektor swasta dalam melaporkan kegiatannya pada *stakeholders* di perusahaan tersebut. Namun, dalam sektor publik atau pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah masih kecil sekali pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet. Survei yang dilakukan oleh BPS, bahwa penggunaan internet dalam mencari informasi berita menjadi peringkat dua, sebesar 78,49% dan mencari informasi lembaga pemerintahan menduduki peringkat empat, sebesar 65,07% lebih tinggi dari sosial media yang berada di peringkat lima, sebesar 61,23%. Meskipun sudah ada data yang mendukung tentang penggunaan internet oleh masyarakat, nampaknya pemerintah daerah belum memaksimalkan peran internet dalam pemerintahannya. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya lebih melihat peran internet tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

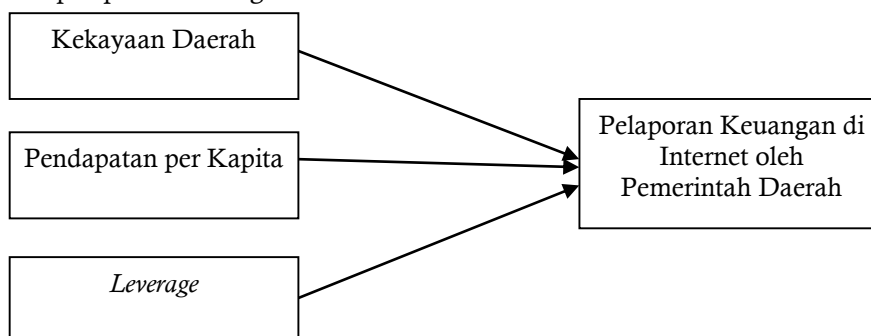
Stakeholder theory mengatakan bahwa entitas tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Dengan demikian, keberadaan suatu entitas sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada entitas tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Gray, Kouhi, dan Adams dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan itu harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi”.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor determinan pengungkapan laporan keuangan di internet banyak dilakukan di sektor swasta dan organisasi nirlaba. Penelitian tersebut yaitu Brennan dan Hourigan, (2000), Laswad *et al* (2001), Serrano *et al.* (2008), Ghani (2010), dan Sharma (2013). Selain itu, di Indonesia ada beberapa peneliti yang meneliti faktor pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Penelitian

tersebut adalah Sinaga (2010), Rahman (2013), dan Afryansyah (2013).

Beberapa peneliti terdahulu seperti Laswad *et al.* (2001), Serrano *et al.* (2008), Sinaga (2010), Rahman (2013), dan Afryansyah (2013), telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet

oleh pemerintah daerah. Atas dasar ketidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti, dan beberapa variabel independen yang masih jarang diteliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan *leverage*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis

Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Pemerintah daerah sebaiknya menunjukkan kekayaan daerahnya guna meraih simpati dari masyarakat yaitu dengan melaporkan keuangan daerahnya lewat internet. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) mendapatkan hasil kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sinaga (2011) dan Afryansyah (2013) diperoleh hasil kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Karena adanya perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini menggunakan variabel tersebut untuk diteliti lebih lanjut dalam pelaporan keuangan pemerintah di internet.

Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatlah perekonomian

daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan daerah maka semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Level ekonomi dalam masyarakat daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat setempat juga mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Perekonomian masyarakat setempat juga mempengaruhi teknologi yang di adaptasi oleh masyarakat tersebut. Sehingga, pengungkapan laporan keuangan di internet pun bisa menjadi terpengaruh oleh pendapatan perkapita daerah tersebut. Menurut Ho dalam Serano *et al.* (2009), daerah dengan pendapatan perkapita yang rendah kurang mengadopsi desain website yang baik, begitu juga dengan permintaan untuk jasa penggunaan internet. Masyarakat dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, tak terkecuali internet. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu

contohnya yaitu dengan pelaporan keuangan daerahnya melalui internet.

Teknologi yang dipakai dengan pendapatan yang diterima akan senantiasa berbanding lurus. Lingkungan yang memiliki teknologi tinggi, pemerintah harus menyesuaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga daerah dengan penggunaan internet yang besar kemungkinan besar pemerintah akan melaporkan keuangan daerahnya melalui internet khususnya website pemerintah daerah setempat. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Cormier *et al.* dalam Sharma (2013) semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin rendah tingkat pengungkapan informasi perusahaan tersebut. Rendahnya tingkat pengungkapan informasi mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* itu sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat mempengaruhi laporan keuangan pada akhirnya. Semakin tinggi tingkat pinjaman suatu perusahaan maka semakin tinggi resiko yang dimiliki perusahaan tersebut. Penelitian dalam pemerintahan yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2001) diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sedangkan pada pemerintah daerah di Indonesia yang diteliti oleh Sinaga (2011) diperoleh hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Penelitian Rahman (2013) diperoleh hasil *leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Leverage atau pinjaman dari luar dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. *Leverage* pemerintah daerah yang tinggi memiliki ketergantungan pada kucuran dana dari kreditur yang dianggap sebagai modal untuk pembangunan daerahnya. Tuntutan untuk mewujudkan *Good Corporate*

Governance dalam pemerintahan menjadikan pemerintah daerah lebih terbuka dengan pelaporan keuangannya. Masyarakat memiliki wewenang yang lebih untuk mengendalikan pemerintahannya karena dalam teori *stakeholder* masyarakat dijadikan “pemilik” dari entitas tersebut. Masyarakat dapat mengendalikan roda pemerintahan secara tidak langsung diantaranya dengan meminta pertanggung jawaban dari pemerintah lewat pelaporan keuangan yang lebih transparan melalui internet meskipun tingkat *leverage* yang dimiliki rendah ataupun tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia.

METODE

Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Jumlah pemerintah daerah di Indonesia adalah sebanyak 98 Pemerintahan Kota, 410 Pemerintahan Kabupaten dengan jumlah total keseluruhan yaitu 508 populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel yang diteliti sebesar 50 sampel yaitu pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP dan WTP-DPP. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.21.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia

Pengungkapan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban suatu entitas atas kegiatan operasional entitas tersebut, dalam hal ini pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi objeknya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pejabat sektor publik harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Artinya yaitu, pelaporan keuangan sukarela sebaiknya lebih diutamakan terutama kepada *stakeholders*-nya yaitu masyarakat. Pengukuran pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah menggunakan indeks *scoring* yang diteliti oleh Garcia dalam Afriansyah (2013).

Variabel Independen

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bisa di kontrol melalui kekayaan yang dimiliki. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dengan tingkat kekayaan daerah yang tinggi. Pengukuran kekayaan daerah menggunakan proksi total aset.

Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Cara penghitungan PDRB sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{PDRB tahun } t}{\text{Penduduk daerah dalam tahun } t}$$

Leverage

Leverage menunjuk pada hutang yang dimiliki oleh suatu entitas. Arti harafiah *leverage*

yaitu pengungkit/ tuas yang berasal dari kata *lever*. Hutang yang berasal dari kreditur merupakan suatu sarana untuk meningkatkan pendapatan yang dimiliki suatu entitas. Penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* dalam mengukur *leverage*. Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Debt (hutang)}}{\text{Equity (modal)}}$$

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolahnya. Data tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan dari BPK yang telah diaudit, serta pendapatan per kapita.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terdapat masalah asumsi klasik seperti diatas atau tidak. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pel Keu	50	1,00	10,75	4,9150	2,73144
Kek Dae	50	303182261162,00	22858193509227,00	12916496291435,9595	3243484031425,73800
Pend per Kap	50	2658180,79	21961498,55	8119373,8956	4710020,05238
Leverage	50	,00	,05	,0057	,00969

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 50 unit, dapat diperoleh hasil untuk nilai Pelaporan Keuangan tertinggi sebesar 10,75 poin, Kekayaan Daerah tertinggisebesar Rp. 22.858.193.509.227, Pendapatan per Kapita tertinggi sebesar Rp. 21.961.498,55, dan *Leverage* tertinggi sebesar 0,05. Nilai Pelaporan Keuangan terendah sebesar 1 poin, Kekayaan Daerah terendah sebesar Rp. 303.182.261.162, Pendapatan per Kapita terendah sebesar Rp. 2.658.180, dan *Leverage* terendah sebesar 0,00.

Nilai rata-rata dari variabel pelaporan keuangan sebesar 4,950 poin dengan nilai standar deviasi 2,73144. Nilai rata-rata dari variabel kekayaan daerah sebesar Rp. 12.916.496.291.435 dengan standar deviasi Rp. 3.243.484.031.425,73800. Nilai rata-rata dari variabel pendapatan per kapita sebesar Rp. 8.119.373 dengan standar deviasi Rp. 4.710.020. Nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,0057 dengan standar deviasi sebesar 0,00969.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebesar 0,651 dan tingkat signifikan pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji Multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Kekayaan Daerah (1,146), Pendapatan per Kapita (1,159), dan *Leverage* (1,014)). Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Uji heterokedastisitas menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana tingkat signifikansi untuk semua variabel independen di atas 0,05 atau 5% (Kekayaan Daerah (0,468), Pendapatan per Kapita (0,315), dan *Leverage* (0,114)). Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan Pelaporan Keuangan = $3,456 - 1,409E-013(X_1) + 2,136E-007(X_2) - 27,295(X_3) + e$. Pada pengujian hipotesis dilakukan uji t. Berikut adalah Tabel dari uji parsial.

Tabel 2. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket.
	B	Std. Error				
(Constant)	3,456	,807		4,280	,000	
Kekay Dae	-1,084E-013	,000	-,049	-,333	,741	Ditolak
1 Pend per Kap	2,136E-007	,000	,368	2,506	,016	Diterima
Leverage	-27,295	38,777	-,097	-,704	,485	Ditolak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil pada tabel 2 hipotesis pertama **ditolak** karena tingkat signifikansi kekayaan Daerah lebih dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Kesimpulannya jika terjadi kenaikan atau penurunan kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak akan menambah jumlah pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2013). Hasil ini juga mengindikasikan bahwa kekayaan daerah belum

menjadi alasan diungkapnya laporan keuangan di internet.

Pengungkapan laporan keuangan di internet sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kekayaan daerah yang besar belum menjamin pemerintah daerah lebih transparan begitu juga sebaliknya, disini peran dari *stakeholder* yaitu masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kegiatan operasi dari pemerintah serta mendorong pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang

dilakukannya. Bentuk partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mendorong pemerintah daerahnya mempublikasikan laporan keuangan di internet, sehingga hak dan kewajiban antara kedua pihak telah terpenuhi.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima** karena tingkat signifikansi pendapatan per kapita kurang dari $\alpha=5\%$. Hasil ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan menambah jumlah pengungkapan laporan keuangannya di internet. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Serrano *et al.* (2008). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan lebih dapat tekanan dalam melakukan pelaporan keuangan karena semakin tinggi tingkat kebutuhan dan pendidikan masyarakat yang menuntut transparan dari pemerintah daerahnya.

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator perekonomian suatu pemerintahan baik itu dalam skala nasional ataupun daerah. Pendapatan per kapita dapat menjadi indikator daya beli ekonomi masyarakat terhadap ragam kebutuhan yang mereka butuhkan, salah satunya yaitu kebutuhan informasi lewat media internet. Internet akan menjadi kebutuhan yang penting karena standar kehidupan yang meningkat di masyarakat, sehingga pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah dapat menjadi tuntutan dari masyarakat setempat.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini **ditolak** karena tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan *leverage* tidak akan mempengaruhi jumlah pengungkapan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sinaga (2011). Hutang merupakan bukan komponen pendanaan yang utama dalam kegiatan operasi pemerintah daerah, sehingga tingkat *leverage* tidak diperhitungkan oleh pemerintah dalam rangka pengungkapan laporan keuangan di internet.

Pemerintah daerah yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menutupi laporan

keuangan yang dimilikinya, atau dengan kata lain mereka tidak menyampaikan laporan keuangan secara terbuka contohnya lewat internet. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah lebih mandiri dari segi pendanaan, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak luar. Pengungkapan laporan keuangan di internet merupakan jalan yang baik dalam mendapatkan dana dari luar, namun pemerintah daerah terkesan masih menutup mata dengan fenomena yang ada meskipun pemerintah daerah tersebut mendapatkan predikat WTP ataupun WTP-DPP yang dapat menjadi nilai jual tersendiri.

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,377 ^a	,142	,087	2,61055

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 4 menunjukkan besarnya nilai *adjusted R2* 0,087 yang berarti 8,7% variabel Pelaporan Keuangan di Internet dapat dijelaskan oleh variabel kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan *leverage*. Sedangkan sisanya 91,3% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukan variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Tingkat pendapatan per kapita belum ada kriteria yang baku untuk pengukuran dari pemerintah sehingga menggunakan kriteria dari *World Bank*, secara tidak langsung belum bisa mewakili tingkat pendapatan per kapita dengan lingkup Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil data dari DJPK

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) agar data yang digunakan akurat dan *real time*, sehingga dapat mencerminkan keadaan yang ada secara jelas.

REFERENSI

- Afryansyah, Rahmad Dian. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.
- Brenan, Niamh. Denis, Hourigan. (2000). "Corporate reporting on the internet by Irish Companies", *Irish Accounting Review*, Vol. 7, No. 1, 1999 pp. 37-68, Dublin.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. BPK RI.
- Ghozali, Imam. Anis, Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang. FE UNDIP
- <http://harianti.com/survei-bps-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-2013-tembus-71-juta-orang/> diunduh pada 26 mei 2014 pukul 12.03
- Puspita, Rora. Dwi, Martani. (2012). "Analisis pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda". Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin.
- Rahman, Aditya. Sutaryo. Agus, Budiarmanto (2013). "Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XVI Hal. 129-155, 2013. Manado.
- Serrano, Carlos. Mar. Rueda. Pilar, Portillo. 2008. "Factors influencing e-disclosure in local public administrations". *Dteconz*, Vol. 3. 2008, Zaragoza, Spanyol.
- Sinaga, Yurisca Febrianty. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan laporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.